

KOMISIONER LEMBAGA PERSAINGAN USAHA 2018-2023

KPPU Jangan Kalah Cepat

Sembilan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2018—2023 akhirnya resmi dilantik oleh Presiden Jokowi.

David Eka Issetiabudi, M.G. Noviarizal Fernandez & Amanda K. Wardhani redaksi@bisnis.com

Mimik wajah berbeda dari para komisioner tampak jelas menjelang pelantikan kemarin (2/5). Ada ketegangan, semringah, dan juga raut wajah cair terpantul dari wajah-wajah para anggota lembaga persaingan usaha tersebut.

Pengangkatan Komisioner KPPU tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat anggota KPPU periode 2012—2018 dan Pengangkatan Keanggotaan KPPU periode 2018—2023.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak KPPU berdiri, pelantikan diangkat keempat ini digelar di Istana Negara. Tentu menimbulkan rasa yang berbeda.

"Dalam sejarah berdirinya KPPU, ini diangkat keempat yang baru dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Ini sejarah bagi KPPU dan menunjukkan penghargaan negara terhadap ekistensi KPPU," ungkap Chandra Setiawan sesuai pelantikan di Istana Negara.

Hal ini juga diumumkan oleh Ketua KPPU periode 2012—2018 Muhammad Syarkawi Rauf. Pada tahun-tahun sebelumnya, komisioner belum pernah dilantik di Istana Negara.

Namun, hal ini bisa saja diartikan kalau pemerintah dalam hal ini Kepala Negara mempunyai atensi kepada Komisi, khususnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan persaingan usaha yang sehat.

Posisi strategis KPPU kini semakin dilihat. Di sisi lain, sejumlah tantangan pengawasan persaingan usaha tentu ikut bertambah.

Terkait dengan payung hukum persaingan usaha saja, misalnya, saat ini masih mengadalkan Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Padahal, zaman semakin beru-

Setelah sembilan komisioner dilantik, sejumlah pekerjaan rumah yang menumpuk sudah menunggu.

bah yang diiringi dengan doktrin persaingan usaha yang tidak kalah dinamis. Maka tak heran setelah resmi diangkat menjadi pengawas persaingan usaha, para komisioner ini harus langsung "ngebut".

Bagi pelaku usaha, komisioner baru KPPU ini bisa menjadi agen perubahan, terutama untuk UU No.5/1999.

"Sebuah peraturan dibuat harus dalam upaya membina, bukan membina-sakan atau mematikan iklim investasi," ujar Dana Girindrawardana, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Kebijakan Publik.

Salah satu yang harus diubah, kata dia, terkait dengan kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang selama ini melekat pada KPPU karena hal itu melabrak sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. "KPK saja tidak memiliki kewenangan mengadili sebagaimana KPPU dan hal ini ada di dalam UU, bukan diskresi para komisioner," jelasnya.

Selain itu, juga soal denda maksimal 30% dari omzet bagi pelaku bisnis yang terbukti melanggar kaidah persaingan usaha yang sehat.

Besaran denda tersebut dinilai terlampaui tinggi dan akan menjadi bagian yang mematkan bagi beberapa industri. Hampir tidak mungkin sebuah perusahaan, termasuk retail perbankan atau industri padat karya lainnya bisa bertahan jika harus membayar denda sebesar itu.

Program liniensi atau whistleblower (WB) atau justice collaborator (JC) dengan memberi keringanan hukuman bagi pelaku usaha yang kooperatif selama periode pemeriksaan juga menjadi catatan yang harus didefinisikan secara cermat karena bisa menimbulkan implikasi negatif di masa mendatang.

"Dunia swasta rentan nasibnya, beda dengan di instansi pemerintah,

Profil 9 Komisioner KPPU 2017-2022

Table with 3 columns: Name, Position, and Affiliation. Includes Afif Hasbullah, Guntur Syahputra Saragih, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Ukay Karyadi, Yudi Hidayat, Chandra Setiawan, Dinni Melanie, and Harry Agustanto.

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah

di mana JC atau WB bisa disembunyikan identitasnya dan dilindungi oleh UU. Di swasta, JC atau WB harus benar-benar terdefinisi dengan baik karena jika identitasnya ketahuan, maka karier seseorang atau suatu perusahaan akan terhambat, baik di industri yang sama atau di industri yang lain," tutur Dana.

PRIORITAS

Ada beberapa hal yang akan menjadi prioritas komisioner dalam menetapkan visi dan misi kerja ke depan. Pertama, soal sinergi dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan beragam isu, khususnya, soal ketahanan pangan.

Oleh karenanya, Komisi akan merumuskan panduan (guide line) bagi pengusaha yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk menjunjung tinggi persaingan usaha yang sehat.

Menurut Chandra, penguasaan yang baru ini akan berusaha mengubah citra organisasi yang selama ini sering kali ditakuti oleh pengusaha.

"Yang terpenting kita berusaha agar [urusan] persaingan usaha ini bukan sesuatu yang menakutkan," ujarnya.

Kedua, soal kelembagaan KPPU. Komisioner KPPU Dinni Melanie menyebutkan bahwa pihaknya akan meneruskan agenda amendemen UU No.5/1999, yang salah satunya

mengamanatkan mengenai penguatan kelembagaan KPPU.

Penguatan kelembagaan yang dimaksud, meliputi penguatan penyelidikan, status lembaga yang memiliki persamaan seperti Kementerian/Lembaga, dan lainnya.

Merujuk draf amendemen yang diterbitkan DPR, pasal penguatan KPPU sudah banyak disinggung.

"Pastinya kita inginnya amendemen UU No. 5/1999 bisa diselesaikan segera, tahun ini. Jadi dengan amendemen itu, diharapkan kerja KPPU lebih optimal," katanya.

Ketiga, Komisi wajib cepat beradaptasi dengan perubahan. Apalagi, tantangan persaingan usaha sudah tidak lagi memperhatikan wilayah. Globalisasi dan perkembangan teknologi mengantar era e-commerce, financial technology, dan platform bisnis lain berubah.

Perubahan model bisnis tersebut tentunya menuntut adanya perubahan doktrin persaingan usaha.

Hal inilah yang coba diupayakan para komisioner KPPU 2018—2023.

Komisioner KPPU Kurnia Toha menyebutkan tantangan perubahan teknologi yang begitu cepat tidak menjadi alasan bagi Komisi untuk tertinggal, kendati banyak kelemahan Komisi untuk melihat celah persaingan usaha tidak sehat yang timbul dari aktivitas model bisnis baru.

Kurnia menganggap hal itu tidak bisa menjadi penghalang. Sementara itu, amendemen beleid persaingan usaha menjadi keniscaayaan dan diharapkan menjadi prioritas.

"Teori begitu cepat berubah, kita dipacu untuk mengikuti perubahan itu, karena berpengaruh pada pola persaingan. Melihat kemajuan teknologi ini, tidak bisa dipungkiri, perubahan yang ada merupakan dampak persaingan usaha juga," tambahnya.

Setelah sembilan komisioner dilantik, sejumlah pekerjaan rumah yang menumpuk sudah menunggu. Berbagai agenda menunggu, seperti, pembahasan RUU Persaingan Usaha, perkara persaingan usaha yang masih berjalan, serta aktivitas sinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Hanya saja, sebelum semuanya dilakukan, para komisioner perlu menyiapkan siapa yang akan menjadi Ketua dan Wakil Ketua KPPU. Nantinya, mekanisme pemilihan tersebut ditentukan dari rapat internal sembilan komisioner.

Ke depan, menurut Muhammad Syarkawi Rauf, KPPU tetap harus menyeimbangkan antara pencegahan dan penegakan hukum yang kuat. Prinsipnya, mencegah terjadinya pelanggaran jauh lebih baik dibandingkan dengan menghukum tanpa mengabaikan tindakan hukum bagi mereka yang melanggar hukum.

SIDANG LANJUTAN



Antara/Rivan Awal Lingga

Terdakwa kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara Rita Widayarsi (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor,

Jakarta, Rabu (2/5). Sidang Bupati Kutai Kartanegara nonaktif itu mengagendakan mendengarkan keterangan saksi.

MASUK PKPU

Sapta Reksa Utama Yakin Bisa Bayar Utang

JAKARTA — PT Sapta Reksa Utama optimistis bisa melunasi utangnya sebesar Rp146 miliar kepada 37 krediturnya dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Pengurus PKPU PT Sapta Reksa Utama Muhammad Idris mengatakan bahwa proyek pengolahan gas di Kabupaten Pasuruan-Madura yang dilakukan oleh Husky CNOOC Madura Ltd. sudah selesai.

Dengan demikian, jelasnya, nilai kontrak sebesar US\$70.000 dari proyek tersebut bisa dibayarkan kepada krediturnya.

"Itu yang bikin macet. Memang kalau dibayar [oleh Husky CNOOC Madura Ltd.] akan selesai [utang]. Tetapi, kan ada aset lain milik debitor karena ada proyek sedang dibangun dan bisa dibayar ke kreditor. Semoga tidak masuk pailit," ujarnya, Rabu (2/5).

PT Sapta Reksa Utama (SRU) Rp146 miliar itu terdiri dari piutang dari kreditor konkuren Rp59 miliar, kreditor separatis

Rp84,63 miliar, dan pajak milik kreditor preferen yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Rp300 juta.

Kuasa hukum PT Sapta Reksa Utama Turi Rihat Pandapotan mengatakan, merujuk pada proposal perdamaian, PT Sapta Reksa Utama (SRU) saat ini memegang tagihan piutang yang telah di-invoice-kan dari proyek pengerjaan olahan gas di Kabupaten Pasuruan-Madura kepada Husky CNOOC Madura Ltd. dengan nilai kontrak sebesar US\$70.000.

Dia berharap agar tagihan piutang itu bisa segera dilunasi oleh Husky CNOOC Madura Ltd. sehingga bisa digunakan untuk membayar angsuran kepada para rekanan kontraktor, cicilan bank, dan pajak milik PT SUR.

Selain itu, papar Turi, kliennya juga sedang menunggu dana sebesar Rp3,75 miliar dari PT Dimas Utama (dalam pailit).

"Memang ada proyek yang sedang berjalan, dan SUR belum menerima dana dari investor.

Kami memahami kondisi dari para kreditor yang butuh kepastian pembayaran, makanya kami jelaskan sumber dana untuk membayar tagihan di penawaran proposal," kata dia.

Dengan demikian, dia berharap agar proposal perdamaian yang akan diperbaiki sebelum voting perdamaian pada 15 Mei 2018 bisa diterima oleh para kreditor.

Sebelumnya, PT SUR mengajukan permohonan PKPU atas dirinya sendiri dengan nomor perkara No. 166/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pasalnya, perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas itu memiliki utang kepada 34 kreditor konkuren, 2 kreditor separatis, dan 1 kreditor preferen.

"Nanti dalam rencana pembayaran utang, para kreditor separatis terlebih dahulu dilakukan [prioritas] karena memiliki aset PT SUR dan dibayar secara angsuran sebanyak 10 tahun. Kalau yang konkuren nanti selama 5 tahun pembayaran," kata dia. (Yanuaris Videogo)

GMF AERO Asia RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017. Includes meeting details, agenda, and financial reports.